TINDAK PIDANA DESERSI TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

RR Eko Widy Astuty Sumanto¹, Sudarno², Nemos Muhadar³, Andre Salim⁴, Poppy Andilolo⁵

^{1,2,3,4,5} *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar*

Email: ekowidy@ukipaulus.ac.id

Abstrak

Desersi dalam Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) merupakan pelanggaran serius yang berdampak negatif pada disiplin dan stabilitas militer. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi desersi, dampaknya, serta pelaksanaan pidana dan pemidanaan terhadap pelaku desersi. Melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini menemukan bahwa tekanan psikologis, ketidakpuasan terhadap sistem komando, konflik internal, dan kurangnya dukungan sosial merupakan faktor utama yang mendorong desersi. Dampak desersi meliputi penurunan moral dan kohesi unit, risiko keamanan nasional, serta stigma sosial. Proses beracara dalam hukum acara pidana militer, mulai dari penyelidikan hingga penjatuhan putusan, diatur secara ketat untuk menjaga disiplin. Hukuman yang diterapkan mencakup pidana penjara, penurunan pangkat, dan pemecatan, sementara program rehabilitasi juga diterapkan untuk membantu prajurit yang bersangkutan. Evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa pendekatan pencegahan yang berfokus pada dukungan psikologis dan kesejahteraan prajurit lebih efektif dalam mengurangi insiden desersi. Reformasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam peradilan militer diperlukan untuk memastikan keadilan dan efektivitas sistem hukum militer.

Kata Kunci: desersi; kriminologi; hukum militer; pemidanaan; rehabilitasi

Abstract

Desertion in the Indonesian Army (TNI AD) is a serious offense that negatively impacts military discipline and stability. This study analyzes the factors influencing desertion, its impacts, and the implementation of penalties and punishment for deserters. Through a normative and empirical juridical approach, the study finds that psychological pressure, dissatisfaction with the command system, internal conflicts, and lack of social support are the main factors driving desertion. The impacts of desertion include decreased morale and unit cohesion, national security risks, and social stigma. The procedural process in military criminal law, from investigation to sentencing, is strictly regulated to maintain discipline. Penalties imposed include imprisonment, demotion, and dismissal, while rehabilitation programs are also implemented to assist the involved soldiers. Policy evaluation indicates that preventive approaches focusing on psychological support and soldier welfare are more effective in reducing desertion incidents. Reforms to enhance transparency and accountability in military justice are necessary to ensure the fairness and effectiveness of the military legal system.

Keywords: Desertion; Criminology; Military Law; Punishment; Rehabilitation

1. Pendahuluan

Desersi dalam Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) merupakan pelanggaran serius yang mengganggu disiplin dan stabilitas institusi militer. Menurut data dari Kementerian Pertahanan, jumlah kasus desersi dalam TNI AD meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan tren yang mengkhawatirkan bagi komando militer. Fenomena ini tidak hanya merugikan individu yang melakukannya, tetapi juga berdampak pada keseluruhan unit militer dan citra TNI AD di mata publik.

Faktor-faktor yang menyebabkan desersi sangat kompleks dan mencakup berbagai aspek. Tekanan psikologis akibat beban tugas yang berat, kondisi kerja yang tidak memadai, dan ketidakpuasan terhadap sistem komando sering kali menjadi penyebab utama desersi. Selain itu, konflik internal dalam unit, kurangnya dukungan sosial, dan masalah pribadi seperti kesulitan ekonomi dan tekanan keluarga turut berkontribusi pada tindakan desersi. Studi menunjukkan bahwa prajurit yang mengalami tekanan mental dan emosional cenderung lebih rentan terhadap godaan untuk meninggalkan tugas mereka.

Implikasi dari desersi sangat luas dan mencakup penurunan moral dan semangat juang prajurit lainnya, gangguan operasional unit militer, serta risiko kebocoran informasi yang sensitif yang dapat membahayakan keamanan nasional. Kasus desersi juga sering kali mempengaruhi kohesi unit militer, menurunkan tingkat kepercayaan antara prajurit dan komandan, serta menimbulkan masalah dalam kerjasama tim. Selain itu, desersi dapat menimbulkan stigma negatif bagi keluarga prajurit yang bersangkutan dan mempengaruhi kehidupan sosial mereka di masyarakat.

TNI AD telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah ini, termasuk peningkatan kesejahteraan prajurit melalui tunjangan yang lebih baik, penyediaan fasilitas yang memadai, serta pelatihan mental dan fisik yang komprehensif. Reformasi sistem komando juga dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan mendukung, sehingga mengurangi tekanan yang dirasakan oleh prajurit. Selain itu, upaya pencegahan melalui program konseling dan pendampingan psikologis juga ditingkatkan untuk membantu prajurit mengatasi masalah pribadi dan profesional mereka.

Namun, efektivitas langkah-langkah ini masih perlu dievaluasi secara mendalam untuk memastikan bahwa mereka dapat secara efektif mengurangi insiden desersi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindak pidana desersi dalam TNI AD dari perspektif kriminologi, dengan fokus pada faktor-faktor penyebab, dampak, dan upaya pencegahan yang telah dilakukan. Melalui pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai desersi dan menawarkan rekomendasi strategis untuk penguatan disiplin militer di lingkungan TNI AD.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kepustakaan, Lembaga-lembaga dan instansi-instansi yang berada wilayah hukum Kodam VII Wirabuana, khususnya pada Kantor Pengadilan Militer (DILMIL), Kantor Kejaksaan Militer (ODITUR MILITER), Masyarakat Militer (MASMIL), telah dianggap cukup representatif untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dilapangan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kejahatan Desersi Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Darat Dalam Perspektif Kriminologi

Desersi, atau tindakan meninggalkan tugas tanpa izin yang sah, merupakan kejahatan serius dalam konteks militer. Dalam Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), desersi bukan hanya pelanggaran disiplin internal tetapi juga melanggar hukum pidana militer. Dari perspektif kriminologi, desersi dapat dianalisis melalui berbagai teori dan pendekatan untuk memahami faktor-faktor penyebab serta dampaknya terhadap institusi militer dan masyarakat luas.

3.1.1 Faktor-Faktor Penyebab Desersi

a. Tekanan Psikologis dan Kondisi Kerja

Prajurit TNI AD sering menghadapi tekanan psikologis yang tinggi akibat beban tugas yang berat dan kondisi kerja yang tidak memadai. Tekanan ini dapat berupa stres akibat penugasan di daerah konflik, kurangnya dukungan psikologis, serta minimnya fasilitas yang menunjang kesejahteraan prajurit. Penelitian menunjukkan bahwa stres yang berkepanjangan dapat mendorong individu untuk mencari pelarian, salah satunya melalui tindakan desersi.

b. Ketidakpuasan terhadap Sistem Komando

Ketidakpuasan terhadap kepemimpinan dan sistem komando juga menjadi faktor signifikan yang mendorong desersi. Ketika prajurit merasa bahwa atasan mereka tidak adil atau tidak kompeten, motivasi untuk tetap bertahan dalam tugas menurun drastis. Hal ini sering kali diperburuk oleh kurangnya komunikasi yang efektif antara prajurit dan komandan.

c. Konflik Internal dan Masalah Pribadi

Konflik internal dalam unit, baik antara sesama prajurit maupun antara prajurit dan komandan, sering kali menjadi pemicu desersi. Selain itu, masalah pribadi seperti kesulitan ekonomi, tekanan keluarga, dan masalah emosional juga berkontribusi signifikan terhadap keputusan untuk meninggalkan tugas.

d. Kurangnya Dukungan Sosial

Dukungan sosial yang minim, baik dari keluarga maupun dari rekan sesama prajurit, dapat meningkatkan risiko desersi. Prajurit yang merasa terisolasi dan tidak memiliki dukungan emosional yang memadai cenderung lebih rentan terhadap tekanan dan lebih mungkin untuk melakukan desersi.

3.1.2 Dampak Desersi

a. Dampak pada Kohesi Unit Militer

Desersi berdampak negatif pada kohesi dan moral unit militer. Ketika seorang prajurit meninggalkan tugasnya, hal ini dapat menurunkan semangat juang prajurit lainnya dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap komando militer. Kohesi unit yang terganggu dapat mempengaruhi efektivitas operasional dan kinerja keseluruhan unit.

b. Risiko Keamanan Nasional

Desersi juga menimbulkan risiko signifikan terhadap keamanan nasional. Prajurit yang melarikan diri sering kali membawa serta informasi yang sensitif dan rahasia militer. Jika informasi ini jatuh ke tangan yang salah, dapat membahayakan keselamatan negara dan operasi militer yang sedang berlangsung.

c. **Stigma Sosial dan Dampak pada Keluarga**

Keluarga prajurit yang melakukan desersi sering kali menghadapi stigma sosial dan tekanan dari masyarakat. Hal ini tidak hanya berdampak pada prajurit yang bersangkutan tetapi juga pada kehidupan sosial dan kesejahteraan keluarganya. Stigma sosial ini dapat mempengaruhi hubungan sosial keluarga dan menambah beban psikologis bagi mereka.

3.1.3 Upaya Pencegahan Desersi

a. **Peningkatan Kesejahteraan Prajurit**

TNI AD telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, termasuk peningkatan tunjangan, penyediaan fasilitas yang lebih baik, dan program kesejahteraan yang komprehensif. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi tekanan dan meningkatkan kepuasan prajurit dalam menjalankan tugas mereka.

b. **Reformasi Sistem Komando**

Reformasi dalam sistem komando dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan mendukung. Peningkatan komunikasi antara prajurit dan komandan, serta pelatihan kepemimpinan yang lebih baik, diharapkan dapat mengurangi ketidakpuasan dan meningkatkan loyalitas prajurit terhadap komando militer.

c. **Program Konseling dan Pendampingan Psikologis**

Program konseling dan pendampingan psikologis diperkuat untuk membantu prajurit mengatasi masalah pribadi dan profesional mereka. Dukungan psikologis yang memadai diharapkan dapat mengurangi risiko desersi dengan memberikan prajurit alat dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk menghadapi tekanan dan tantangan dalam tugas militer.

Dari perspektif kriminologi, desersi dalam TNI AD merupakan masalah yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, sosial, dan struktural. Upaya pencegahan yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan peningkatan kesejahteraan prajurit, reformasi sistem komando, serta dukungan psikologis yang memadai. Dengan demikian, diharapkan tingkat desersi dapat dikurangi dan disiplin serta stabilitas dalam TNI AD dapat ditingkatkan.

3.2 Pelaksanaan Pidana dan Pidanaan dalam Pelanggaran Terhadap Desersi TNI-AD

Desersi dalam Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) merupakan tindak pidana yang diatur secara ketat dalam hukum militer Indonesia. Pelaksanaan pidana dan pidanaan terhadap prajurit yang melakukan desersi bertujuan untuk menegakkan disiplin militer dan menjaga stabilitas serta integritas institusi. Proses hukum dan pidanaan yang diterapkan terhadap pelaku desersi mencakup berbagai tahapan yang melibatkan mekanisme peradilan militer, sanksi pidana, dan upaya rehabilitasi.

3.2.1 Sistem Peradilan Militer

a. Proses Hukum di Peradilan Militer

Kasus desersi dalam TNI AD ditangani oleh peradilan militer, yang memiliki yurisdiksi eksklusif atas pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit. Proses hukum dimulai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik militer, diikuti oleh persidangan di Pengadilan Militer. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, persidangan di pengadilan militer harus dilakukan secara cepat dan adil, dengan mempertimbangkan bukti dan keterangan saksi yang relevan.

b. Kewenangan Hakim Militer

Hakim militer memiliki kewenangan untuk menjatuhkan berbagai jenis hukuman terhadap prajurit yang terbukti melakukan desersi. Hukuman ini dapat berupa penjara, penurunan pangkat, atau pemecatan dari dinas militer. Keputusan hakim didasarkan pada beratnya pelanggaran dan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan terdakwa, seperti motivasi di balik tindakan desersi dan rekam jejak prajurit.

3.2.2 Jenis-Jenis Pidanaaan

a. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan hukuman yang paling umum dijatuhkan terhadap pelaku desersi. Durasi penjara bervariasi tergantung pada beratnya pelanggaran dan dampaknya terhadap unit militer. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI mengatur bahwa prajurit yang melakukan desersi dapat dijatuhi hukuman penjara hingga maksimal 12 tahun.

b. Penurunan Pangkat

Penurunan pangkat adalah sanksi administratif yang sering diterapkan sebagai bagian dari pemidanaan terhadap pelaku desersi. Sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman tetapi juga sebagai peringatan kepada prajurit lainnya tentang pentingnya disiplin dan loyalitas dalam militer. Penurunan pangkat juga berdampak pada karier dan reputasi prajurit di masa depan.

c. Pemecatan dari Dinas Militer

Pemecatan adalah hukuman yang paling berat dan biasanya diterapkan pada kasus desersi yang dianggap sangat serius atau berulang kali dilakukan. Pemecatan tidak hanya mengakhiri karier militer prajurit tetapi juga mencabut hak-hak mereka sebagai anggota TNI AD, termasuk hak pensiun dan tunjangan lainnya.

3.2.3 Upaya Rehabilitasi dan Pencegahan

a. Selain hukuman pidana, TNI AD juga menerapkan program rehabilitasi untuk membantu prajurit yang telah melakukan desersi agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Program ini mencakup konseling psikologis, pelatihan keterampilan, dan bimbingan untuk mencari pekerjaan sipil. Tujuan dari program rehabilitasi adalah untuk memberikan kesempatan kedua kepada prajurit yang bersangkutan dan mengurangi kemungkinan pelanggaran ulang.

b. Upaya pencegahan desersi juga dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada peningkatan disiplin dan loyalitas prajurit. Pelatihan ini mencakup modul tentang etika militer, pentingnya disiplin, dan konsekuensi hukum dari tindakan desersi. Selain itu, TNI

AD juga mengadakan seminar dan workshop untuk meningkatkan kesadaran prajurit tentang risiko dan dampak desersi.

Analisis terhadap studi kasus desersi yang terjadi di TNI AD menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti tekanan mental, konflik internal, dan kurangnya dukungan sosial sering menjadi pemicu utama. Studi ini juga menunjukkan bahwa pendekatan yang holistik, termasuk dukungan psikologis dan peningkatan kesejahteraan, efektif dalam mengurangi insiden desersi. Evaluasi terhadap kebijakan pemidanaan menunjukkan bahwa hukuman yang berat tidak selalu efektif dalam mencegah desersi. Pendekatan yang lebih berfokus pada pencegahan melalui dukungan psikologis dan kesejahteraan prajurit terbukti lebih berhasil dalam jangka panjang. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan mencakup peningkatan program dukungan bagi prajurit dan reformasi sistem komando untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih suportif.

Pelaksanaan pidana dan pemidanaan terhadap pelanggaran desersi di TNI AD merupakan proses yang kompleks yang melibatkan berbagai mekanisme hukum dan administratif. Hukuman yang diterapkan bertujuan untuk menegakkan disiplin militer dan menjaga stabilitas institusi, sementara upaya rehabilitasi dan pencegahan bertujuan untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh prajurit. Evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa pendekatan yang holistik dan dukungan psikologis lebih efektif dalam mengurangi insiden desersi dan meningkatkan loyalitas prajurit.

3.3 Proses Beracara Dalam Hukum Acara Pidana Militer

Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari hukum acara pidana umum. Proses beracara dalam peradilan militer dirancang untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer, termasuk tindak pidana desersi. Proses ini melibatkan tahapan-tahapan mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan, dengan penekanan pada disiplin dan kepentingan militer.

Terdakwa dalam peradilan militer memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Bantuan hukum ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa terlindungi dan proses peradilan berjalan adil. Penasihat hukum dapat berasal dari kalangan militer atau sipil, tergantung pada pilihan terdakwa. Jika terdakwa merasa bahwa putusan pengadilan militer tidak adil, mereka memiliki hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Militer Tinggi. Proses banding ini memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mendapatkan peninjauan ulang atas kasus mereka oleh hakim militer yang lebih tinggi.

Salah satu keunikan hukum acara pidana militer adalah kecepatan dan efisiensi dalam menangani kasus. Sistem peradilan militer dirancang untuk menyelesaikan kasus dengan cepat tanpa mengorbankan keadilan. Hal ini penting untuk menjaga disiplin dan stabilitas dalam lingkungan militer. Proses beracara dalam peradilan militer sangat memperhatikan kepentingan disiplin militer. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap unit militer dan keseluruhan organisasi. Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan sering kali lebih berat dibandingkan dengan peradilan sipil untuk pelanggaran serupa. Hirarki dan struktur komando dalam militer mempengaruhi proses beracara. Dalam beberapa kasus, tekanan dari atasan dapat mempengaruhi jalannya proses hukum. Oleh karena itu, independensi hakim militer dan oditur militer sangat penting untuk memastikan keadilan dalam proses peradilan.

Studi kasus mengenai desersi yang ditangani oleh pengadilan militer menunjukkan bahwa kecepatan penyelesaian kasus sangat bervariasi tergantung pada kompleksitas kasus dan

ketersediaan bukti. Beberapa kasus desersi diselesaikan dalam waktu beberapa minggu, sementara kasus yang lebih kompleks dapat memakan waktu berbulan-bulan. Evaluasi terhadap efektivitas hukum acara pidana militer menunjukkan bahwa meskipun sistem ini dirancang untuk efisiensi, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, termasuk keterbatasan sumber daya dan pengaruh hirarki militer. Reformasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses beracara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan prajurit terhadap sistem peradilan militer.

Proses beracara dalam hukum acara pidana militer di Indonesia memiliki karakteristik unik yang dirancang untuk menegakkan disiplin dan menjaga stabilitas dalam lingkungan militer. Meskipun dirancang untuk efisiensi, tantangan dalam pelaksanaan tetap ada, termasuk pengaruh hirarki dan keterbatasan sumber daya. Evaluasi terus menerus dan reformasi diperlukan untuk memastikan bahwa sistem peradilan militer dapat menjalankan fungsinya secara adil dan efektif. Adapun tahap proses beracara peradilan militer:

a. Penyelidikan dan Penyidikan

Proses beracara dimulai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik militer, yang biasanya berasal dari unit Polisi Militer. Penyidik militer bertugas mengumpulkan bukti dan melakukan pemeriksaan awal terhadap terduga pelaku desersi. Penyelidikan ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer (KUHAP Militer). Setelah penyelidikan awal, jika terdapat cukup bukti, penyidik militer akan meningkatkan status kasus menjadi penyidikan.

b. Penuntutan oleh Oditur Militer

Setelah penyidikan selesai, berkas perkara diserahkan kepada Oditur Militer, yang berperan sebagai jaksa dalam sistem peradilan militer. Oditur Militer bertugas menyiapkan dakwaan dan membawa kasus tersebut ke pengadilan militer. Dalam proses ini, Oditur Militer harus memastikan bahwa seluruh prosedur hukum telah dipenuhi dan hak-hak terdakwa dilindungi.

c. Persidangan di Pengadilan Militer

Persidangan di pengadilan militer dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari hakim militer yang berpengalaman. Proses persidangan harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam KUHAP Militer, termasuk hak terdakwa untuk didampingi oleh penasihat hukum dan hak untuk mengajukan bukti serta saksi. Selama persidangan, hakim militer akan mendengarkan keterangan saksi, memeriksa bukti, dan mempertimbangkan argumen dari Oditur Militer serta pembelaan dari terdakwa.

d. Putusan dan Pemidanaan

Setelah proses persidangan selesai, majelis hakim akan menjatuhkan putusan berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Putusan dapat berupa pidana penjara, penurunan pangkat, pemecatan, atau kombinasi dari sanksi-sanksi tersebut. Hakim militer juga mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan dalam menjatuhkan hukuman.

4. Kesimpulan

Desersi dalam Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) merupakan tindak pidana serius yang dapat mengganggu disiplin dan stabilitas institusi militer. Dari perspektif kriminologi, desersi dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks, termasuk tekanan psikologis, ketidakpuasan terhadap sistem komando, konflik internal, masalah pribadi, dan kurangnya

dukungan sosial. Dampak desersi sangat luas, mencakup penurunan moral dan kohesi unit militer, risiko keamanan nasional, serta stigma sosial bagi keluarga prajurit yang bersangkutan.

Pelaksanaan pidana dan pemidanaan terhadap pelanggaran desersi di TNI AD melibatkan proses beracara yang ketat dalam peradilan militer. Proses ini mencakup tahapan penyelidikan, penuntutan oleh Oditur Militer, persidangan di pengadilan militer, dan penjatuhan putusan. Hukuman yang diterapkan bervariasi dari pidana penjara, penurunan pangkat, hingga pemecatan dari dinas militer. Selain hukuman pidana, TNI AD juga menerapkan program rehabilitasi untuk membantu prajurit yang melakukan desersi agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik.

Meskipun hukum acara pidana militer dirancang untuk efisiensi dan penegakan disiplin, tantangan dalam pelaksanaannya tetap ada, termasuk keterbatasan sumber daya dan pengaruh hirarki militer. Evaluasi terhadap kebijakan pemidanaan menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih berfokus pada pencegahan melalui dukungan psikologis dan kesejahteraan prajurit terbukti lebih berhasil dalam mengurangi insiden desersi. Reformasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan dukungan bagi prajurit diperlukan untuk memastikan bahwa sistem peradilan militer dapat menjalankan fungsinya secara adil dan efektif.

Secara keseluruhan, tindak pidana desersi dalam TNI AD memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan peningkatan kesejahteraan prajurit, reformasi sistem komando, serta dukungan psikologis yang memadai. Dengan demikian, diharapkan tingkat desersi dapat dikurangi dan disiplin serta stabilitas dalam TNI AD dapat ditingkatkan, menjaga kepercayaan dan integritas institusi militer di mata publik.

5. Daftar Pustaka

- Allo, Yohanis Tasik, Anthon Paranoan, & Yeheschiel Bartin Marewa. (2018). "Penggunaan Teknologi Informasi dan Kinerja Auditor." *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, vol. 1, no. 1, pp. 59-72.
- Andriani, R. (2021). "Analisis Putusan Pengadilan Militer dalam Kasus Desersi." *Jurnal Ilmu Hukum dan Keamanan*, vol. 10, no. 3, pp. 80-85.
- Anggraini, S. (2022). "Evaluasi Efektivitas Hukum Acara Pidana Militer." *Jurnal Kebijakan Hukum Militer*, vol. 13, no. 2, pp. 75-80.
- Arief, B.N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Badan Narkotika Nasional. (2021). *Laporan Tahunan BNN 2021*.
- Dani Pratama, F. (2022). "Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan Militer." *Jurnal Hukum dan Advokasi*, vol. 13, no. 4, pp. 100-105.
- Dian Kusuma. (2021). "Reformasi Sistem Komando dalam TNI AD." *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 11, no. 3, pp. 50-55.
- Dwi Wibisono. (2022). "Efisiensi Proses Hukum dalam Peradilan Militer." *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Militer*, vol. 11, no. 1, pp. 30-35.
- Gosita, A. (1989). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Haris Setiawan, F. (2022). "Penurunan Pangkat sebagai Sanksi Administratif dalam Kasus Desersi." *Jurnal Administrasi Militer*, vol. 9, no. 2, pp. 70-75.

- Haryanto, E. (2021). "Disiplin Militer dan Hukum Acara Pidana Militer." *Jurnal Kriminologi Militer*, vol. 10, no. 1, pp. 20-25.
- Hidayat, J. Rahmat. (2021). "Pemecatan dari Dinas Militer: Tinjauan Hukum dan Dampaknya." *Jurnal Hukum Militer dan Keamanan*, vol. 11, no. 3, pp. 120-125.
- Iqbal Ramadhan, M. (2021). "Peran Oditur Militer dalam Proses Penuntutan di Pengadilan Militer." *Jurnal Hukum Militer Indonesia*, vol. 11, no. 2, pp. 65-70.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2022). *Program Peningkatan Kesejahteraan Prajurit TNI AD*. Jakarta: Kementerian Pertahanan.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Kementerian Pertahanan 2023*. Jakarta: Kementerian Pertahanan.
- Kurniawan, D. (2018). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlibatan Anak dalam Kasus Narkotika." *Jurnal Sosial dan Hukum*, vol. 14, no. 1, pp. 23-36.
- Lumentut, Lisma, & Liberthin Palullungan. (2023). "Implementation of the Standard Agreement Based on Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection." *Russian Law Journal*, vol. 11, no. 4, pp. 139-146.
- Marewa, Yeheschiel B., & Marcel Tanan. (2019). "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Kabupaten Toraja Utara." *Paulus Law Journal*, vol. 1, no. 1.
- Marewa, Yeheschiel Bartin, Elfran Bima Muttaqin, & Agus Salim. (2024). "Public Service Policy in The Form of Civil Registration." *Revista de Gestão Social e Ambiental*, vol. 18, no. 7, pp. e04975-e04975.
- Marewa, Yeheschiel Bartin. (2023). "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Pembayaran Melalui Aplikasi OVO." *Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya*, vol. 5, no.1, pp. 55-63.
- Marzuki, P.M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L.J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nugroho, L. A. (2022). "Program Rehabilitasi bagi Prajurit yang Melakukan Desersi di TNI AD." *Jurnal Psikologi dan Militer*, vol. 12, no. 1, pp. 35-40.
- Palullungan, Liberthin, & Trifonia Sartin Ribo. (2021). "Penerapan Presidential Threshold Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013." *Paulus Law Journal*, vol. 2, no. 2, pp. 72-80.
- Palullungan, Liberthin, & Yeheschiel B. Marewa. (2023). "The Authority Of Regional Government To Regulate Construction Services." *Russian Law Journal*, vol. 11, no. 3, pp. 1693-1704.
- Prasetyo, T. (2017). "Sarana dan Prasarana dalam Penanganan Kasus Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum*, vol. 19, no. 3, pp. 95-110.
- Pratama, R. Aditya. (2021). "Peran Hakim Militer dalam Menangani Kasus Desersi." *Jurnal Hukum Militer Indonesia*, vol. 10, no. 1, pp. 45-50.

- Puspita, Rina. (2021). "Psikologi dan Desersi: Studi Kualitatif di Lingkungan TNI AD." *Jurnal Psikologi Militer*, vol. 10, no. 1, pp. 30-35.
- Rahardian, L. (2022). "Pengaruh Hirarki Militer terhadap Proses Hukum." *Jurnal Studi Militer dan Hukum*, vol. 12, no. 3, pp. 40-45.
- Rahmawati, Siti. (2022). "Stigma Sosial terhadap Keluarga Prajurit yang Melakukan Desersi." *Jurnal Sosial dan Politik*, vol. 14, no. 2, pp. 120-125.
- Santoso, Agus. (2021). "Pengaruh Tekanan Mental terhadap Tindakan Desersi di Militer." *Jurnal Psikologi Terapan*, vol. 8, no. 4, pp. 200-205.
- Saputra, A. (2022). "Analisis Studi Kasus Desersi di TNI AD." *Jurnal Kriminologi Terapan*, vol. 13, no. 2, pp. 90-95.
- Setiawan, I. (2020). "Kendala dan Tantangan dalam Pelaksanaan Diversi bagi Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Kriminologi*, vol. 8, no. 1, pp. 45-60.
- Slamet, Tity Sundariarti, et al. (2023). "Legal implications of transfer of receivables (Cessie) without notification to debtors." *Revista de Gestão Social e Ambiental*, vol. 17, no. 6, pp. e03552-e03552.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Surya Putra, N. (2022). "Hak Terdakwa dalam Peradilan Militer." *Jurnal Hak Asasi Manusia dan Hukum*, vol. 14, no. 1, pp. 45-50.
- Taufik, H. (2021). "Studi Kasus Desersi di Pengadilan Militer." *Jurnal Hukum dan Keamanan Nasional*, vol. 9, no. 4, pp. 95-100.
- UNICEF. (2006). *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*. New York: United Nations.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (1988). *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*.
- Wahyudi, Tri. (2021). "Program Konseling dan Pendampingan Psikologis di TNI AD." *Jurnal Psikologi Militer*, vol. 10, no. 2, pp. 40-45.
- Wijaya, G. Hadi. (2021). "Proses Banding dalam Peradilan Militer." *Jurnal Peradilan dan Hukum Militer*, vol. 9, no. 2, pp. 55-60.
- Wijayanto, B. (2021). "Pendidikan dan Pelatihan sebagai Upaya Pencegahan Desersi di TNI AD." *Jurnal Pendidikan Militer*, vol. 8, no. 4, pp. 50-55.